PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 1994-2023

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S1 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Dhea Biora Chantika

3221061

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2024

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bukittinggi Tahun 1994-2023**" yang di susun oleh saudari **Dhea Biora Chantika** NIM **3221061**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan setujui untuk diajukan ke sidang munaqasah Pada Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 07 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Baginda Parsaulian, SE, ME
NIP. 198403122018011001

SURAT ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Biora Chantika

Nim : 3221061

Tempat/tanggal lahir : Bukittinggi / 01 Februari 2003

Judul skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bukittinggi Tahun 1994-2023

Menyatakan dengan ini bahwa karya ini (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis, apabila di kemudian terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis sedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar penulis di copot sampai batas waktu yang tidak di tentukan.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sejujurnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Mei 2025

Dhea Biora Chantika
NIM.3221061

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bukittinggi tahun 1994-2023".** Disusun oleh Dhea Biora Chantika NIM 3221061. Program Studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi dalam teori Solow Swan penerimaan daerah termasuk akumulasi modal dalam mendanai faktor-faktor produksi, sehingga pendapatan daerah digunakan sebagai modal pembangunan, yang akan mendorong aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhdap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi tahun 1994-2023.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah Uji deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas), Uji T atau uji parsial, Uji Regresi Linear Sederhana dan Uji Koefisien Determinasi atau R^2.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai T_{hitung} sebesar 28,304 > 2,04841. Koefisien regresi PAD sebesar 0,00004062 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,966 mengindikasi 96,6% variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh PAD, sementara sisanya 3,4% dipengaruhi oleh vaiabel lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, Kota Bukitttinggi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga peulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bukittinggi tahun 1994-2023". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari banyaknya dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Bapak Dr. Aidil Alfin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Ibu Rika Widianita, ME selaku ketua program studi Ekonomi Islam yang sudah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

4. Ibu Era Sonita, M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
5. Bapak Baginda Parsaulian S.E, M.E selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan UIN SMDD Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang banyak selama menempuh Pendidikan di UIN SMDD Bukittinggi
7. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Indra Idrus dan Ibunda Erlina, atas do'a tulus yang tidak terputus yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita serta dukungan moral maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakak laki-laki penulis Maulvi Biora Chandra yang telah membantu, memotivasi dan memberi semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi S1 Ekonomi Islam, terkhusus lokal EI-B 21 yang saling mensupport dalam 4 tahun ini

10. Dan kepada penulis, terimakasih telah kuat, terimakasih telah mau berjuang dan tak pernah menyerah dalam keadaan sulit di 4 tahun dan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak. Penulis juga berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terutama bagi penulis sendiri. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan, serta memohon taufik dan hidayahnya untuk kita semua.

Aamiin Allahumma Aamiin

Bukittinggi, 07 Mei 2025

Penulis

Dhea Biora Chantika
NIM.3221061

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
SURAT ORISINILITAS ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 9
F. Penjelasan Judul 10
BAB II LANDASAN TEORI **12**
A. Pertumbuhan Ekonomi 12
B. Otonomi Daerah 26
C. Keuangan Daerah 39
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 50
E. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 53
F. Penelitian Terdahulu 54
G. Kerangka Pemikiran 58
H. Hipotesis 59
BAB III METODE PENELITIAN **60**
A. Jenis Penelitian 60
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 60
C. Jenis dan Sumber data 60
D. Definisi Operasional Variabel 61
E. Teknis Pengumpulan Data 62

F. Teknik Analisis Data 62
G. Pengujian Model 62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 66
B. Hasil Uji Analisis Data 76
C. Pembahasan Hasil Penelitian 83
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data PAD dan PDRB tahun 1994-2023 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 54

Tabel 4. 1 Uji Deskriptif ……76

Tabel 4. 2 Uji Normalitas..... 78

Tabel 4. 3 Uji T (Uji Parsial)..... 80

Tabel 4. 4 Uji Regresi Linear Sederhana 81

Tabel 4. 5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 59

Gambar 4.2 Hasil Uji Normal P-Plot 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi adalah masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang. Untuk mengejar ketertinggalan dalam kemajuan ekonomi dengan negara-negara maju, sehingga diperlukan pendanaan yang besar.[1]

Salah satu komponen penting dari sebuah negara adalah ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat adalah tanda bahwa ekonomi negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik dari sebelumnya. Selain sisi penawaran (konsumsi), peningkatan jumlah penduduk membutuhkan lebih banyak pekerjaan sebagai sumber pendapatan.[2]

Pembangunan nasional adalah upaya yang berkelanjutan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tujuan mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia biasanya berpusat pada sektor ekonomi. Ini karena sebagian besar orang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat mendorong kemajuan di banyak

[1] Eka Afridayani Fitria, 'Pengaruh Ekspor, Tabungan Bruto, Dan Pembentukan Modal Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1.2 (2022), 110–23.

[2] Rts. Ivo Tri Aulia, Siti Hodijah, and Etik Umiyati, 'Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2001-2017', *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 9.1 (2020), 26–34.

bidang lainnya. Bersamaan, pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Menurut teori Adam Smith klasik, ada dua komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi: pertumbuhan output GDP total dan pertumbuhan penduduk. Jika suatu negara memperoleh keuntungan dari kegiatan spesialisasi, pertumbuhan output GDP total dapat dicapai. Tersedianya pasar yag luas untuk menampung produk dapat memungkinkan spesialisasi.[3]

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan laju Produk Domestik Bruto (PDB) dalam skala nasional dan Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam skala daerah menjadi salah satu target dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah. Peningkatan nilai riil produk domestik bruto (PDB) adalah tanda pertumbuhan ekonomi. Tersedianya sumber daya yang cukup dan peningkatan efektivitas penggunaan komponen produksi adalah penyebab utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDB riil, yang juga menunjukkan peningkatan pendapatan nasional, dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Ekonomi dapat berkembang secara ekstensif,

[3] Fakultas Ekonomi and Universitas Tidar, 'Pengaruh Ekspor , Impor , Dan Kurs Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Faqih Alamsyah Putra Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi ; Ekspor ; Impor ; Kurs The Effect of Exports , Imports , and Exchange Rates on Economic Growth in Indonesia The Topic Discu', 4.2 (2022), 121–34.

yang berarti menggunakan lebih banyak sumber daya, atau secara intensif, yang berarti menggunakan sumber daya dengan lebih efisien dan produktif. [4]

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kemajuan suatu daerah. Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota strategis yang terdapat di Provinsi Sumatera barat, memiliki potensi ekonomi yang signifikan berkat sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. dalam mendukung pertumbuhan ekonomi salah satu sumber daya utama yang dapat dioptimalkan adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Optimalisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik yang pada akhirnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

PAD berfungsi sebagai komponen fiskal pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan keseimbangan pendapatan bagi masyarakat setempat, mereka mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini memungkinkan peningkatan PDRB melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan konsumsi.[5] Ketika pemerintah daerah diberi otonomi, pertumbuhan ekonominya berpengaruh karena memberikan kebebasan kepada mereka untuk membuat

[4] Puji Yuniarti, Wiwin Wianti, and Nandang Estri Nurgaheni, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.3 (2020), 169–76.

[5] Siregar, Syahdan Abdul Haris. Pertumbuhan Ekonomi Tahun and others, 'Jdess 02.01.2023', 2.1 (2023), 194–204.

rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi kemajuannya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, pemerintah daerah terdorong untuk membangun ekonomi mereka sendiri. Meningkatnya produktivitas dan pendapatan per kapita penduduk adalah tanda pertumbuhan ekonomi ini, yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan.[6]

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Solow Swan dimana pendapatan daerah digunakan sebagai modal untuk pembangunan, yang akan mendorong aktivitas ekonomi dan menghasilkan barang dan jasa. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebagai hasil dari produksi PDRB.

Penelitian sebelumnya oleh Eka Sri Mulyani dkk. (2021) menemukan bahwa PAD yang lebih tinggi terkait dengan persentase pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah tersebut. Hal ini disebabkan PAD akan meningkat dan modal akan meningkat dari sisi pendapatan pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, berdampak pada masyarakat, dan pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Produk Daerah Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi per tahun. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan harga konstan (rill), karena pengaruh perubahan harga (inflasi) dihilangkan.[7]

---

[6] Novita Dwi Indriyani and Eko Wahyudi, 'Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik)', *Yos Soedarso Economics Journal (YEJ)*, 3.2 (2021), 1–18.

[7] Eka Sri Mulyani, Sudarman Sudarman, and Ratna Fitri Astuti, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020', *Educational Studies: Conference Series*, 1.2 (2021), 1–10.

Tabel 1.1

PAD dan PDRB Kota Bukittinggi tahun 1994-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PDRB (Juta Rupiah)
1994	3.560.803.000	1.677.088,99
1995	4.406.245.000	1.828.840,41
1996	4.474.917.000	1.994.135,12
1997	4.434.230.602	2.110.047,00
1998	3.624.268.000	1.972.259,69
1999	4.751.183.045	2.002.487,93
2000	5.111.730.000	2.081.049,19
2001	8.413.492.000	2.173.579,78
2002	12.207.732.000	2.275.897,03
2003	15.279.873.910	2.397.996,11
2004	19.874.448.552	2.536.482,69
2005	19.320.632.546	2.686.608,43
2006	24.397.364.000	2.852.859,96
2007	26.896.480.000	3.038.010,56
2008	33.828.543.000	3.238.007,44
2009	44.924.168.000	3.408.039,64
2010	33.847.174.752	3.598.796,76
2011	49.232.680.760	3.819.053,61
2012	45.077.000.000	4.069.017,51
2013	55.204.000.000	4.324.423,59
2014	61.604.000.000	4.592.478,19
2015	66.027.359.716	4.874.254,56
2016	71.303.000.000	5.168.975,87
2017	102.375.000.000	5.483.398,44
2018	101.937.000.000	5.812.391,14
2019	111.896.000.000	6.152.076,98
2020	84.080.000.000	6.045.085,08
2021	91.786.000.000	6.236.039,76
2022	130.797.000.000	6.555.327,93
2023	123.112.000.000	6.869.402,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Berdasarkan data pada tabel 1.1 tersebut dapat dilihat terkait data PAD dan PDRB di Kota Bukittinggi 30 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa PDRB Kota

Bukittinggi selama 30 tahun terakhir terus meningkat dari tahun ketahun dan hanya mengalami penurunan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1996-1997 dan juga pada tahun 2019-2020 yang diduga terjadinya penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Sedangkan PAD Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi di beberapa tahun.

Pada tahun 1996-1997 PAD Kota Bukittinggi mengalami penurunan namun PDRB pada saat itu mengalami peningkatan. Pada tahun 2004-2005 PAD pada saat itu mengalami penurunan namun di sisi lain PDRB pada tahun tersebut mengalami peningkatan. Lalu pada tahun 2009-2010 PAD pada saat itu mengalami penurunan, namun PDRB pada saat itu meningkat dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2011-2012 PAD Kota Bukittinggi kembali mengalami penurunan, namun PDRB pada saat itu meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2017-2018 PAD mengalami penurunan, namun PDRB pada saat itu meningkat. Begitu pun pada tahun 2022-2023 PAD Kota Bukittinggi mengalami penurunan, namun di sisi lain PDRB Kota Bukittinggi pada saat itu mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari tabel berfluktuasinya PAD dapat terjadi karena beberapa peristiwa. Pada tahun 1997 terjadi kebakaran di Pasar Atas Bukittinggi, peristiwa tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat PAD ditahun 1997 dan ditahun selanjutnya di tahun 1998. Pada 30 Oktober 2017 Pasar Atas Bukitiinggi kembali mengalami peristiwa kebakaran dan ditanggal 17 November 2017 Pasar Aur Kuning Bukittinggi juga mengalami kebakaran, dimana dampak dari kebakaran

yang terjadi berturut-turut ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan dampaknya kemungkinan berlanjut hingga ditahun selanjutnya sehingga mengakibatkan PAD ditahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 PAD mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19, Secara umum kurangnya realisasi pendapatan pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang mengharuskan penutupan tempat wisata yang menyebabkan penurunan secara drastis kunjungan ke Kota Bukittinggi. karena pada saat ini diberlakukannya pembatasan perjalanan dan penutupan sementara objek wisata sehingga mengurangi pendapatan dari sektor pariwisata. Ditahun 2021 dilakukan upaya pemulihan ekonomi dan berhasil meningkatkan PAD dari tahun sebelumnya.

Dan ditahun 2022 merupakan rekor PAD tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sumber PAD terbesar disumbangkan oleh Taman Marga Satwa Kinantan Bukittinggi (TMSBK) atau Kebun Binatang yang ramai dikunjungi pengunjung. TMSBK berhasil memberi PAD terbesar di Bukittinggi dengan nilai mencapai Rp 24,2 miliar di 2022 ini.

Di tahun 2023 terjadi penurunan pada PAD karena terjadinya penurunan pada target retribusi daerah dikarenakan belum terlaksananya pengelolaan retribusi Pasar Atas sejak selesainya pembangunan di tahun 2020 dan pada tahun tersebut juga bertepatan dengan masa pandemic Covid-19. Pembangunan gedung yang baru mengakibatkan hilangnya objek retribusi lama. Pada saat selesainya pembangunan/penyerahan operasional gedung Pasar Atas di tahun

2020 bertepatan dengan masa terjadinya pandemic Covid 19, pemerintah telah memberikan kebijakan pengurangan/pembebasan retribusi. Disamping itu retribusi pasar yang lama tidak dapat diberlakukan pada gedung yang baru karena sudah berbeda objek retribusinya.[8]

Meskipun terlihat bahwa potensi PAD Kota Bukittinggi cukup besar, terdapat tantangan dalam pengelolaannya, seperti contohnya terjadi flutuasi pada PAD itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kontribusi dari PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di kota ini. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kota Bukittinggi, dengan judul : **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 1994-2023"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut identifikasi masalah untuk penelitian ini:

1. PDRB di Kota Bukittinggi yang cenderung meningkat walaupun terjadi fluktuasi pada PAD
2. Ditahun 2017 terjadi peristiwa kebakaran di Pasar Atas Bukittinggi dan Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang mengakibatkan PAD ditahun selanjutnya menurun

[8] Pemerintah Kota Bukittinggi. *Catatan atas Laporan Keuangan (LKPD 2023)*. 2024. Hlm.15-16

3. Ditahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan PAD dan PDRB ditahun tersebut menurun dari tahun sebelumnya
4. Ditahun 2021 dilakukan upaya pemulihan ekonomi dan berhasil meningkatkan PAD dari tahun sebelumnya
5. Di tahun 2023 terjadi penurunan pada PAD karena terjadinya penurunan pada target retribusi daerah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi studi ini dilaksanakan pada kasus dipilih yaitu Kota Bukittinggi dalam periode tahun 1994-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik pokok permasalahan yaitu seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi pada periode tahun 1994-2023?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi periode tahun 1994-2023.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi
b. Bagi peneliti selanjutnya yang menjadikan penelitian ini sebagai salah satu sumber referensi ataupun pembaca diharapkan dapat menyempurnakan keterbatasan dari penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kedepannya.
c. Bagi pemerintah terkait (stakeholder) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan Pembangunan Pemerintah yang terutama terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD di Kota Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan serta menghindari interprestasi yang berbeda dalam memahami judul penelitian ini makan penulis akan menjelaskan beberapa kosa kata penting dari judul diatas:

1. Pengaruh : adalah daya yang berasal dari sesuatu (baik benda maupun orang) yang berpengaruh pada watak, kepercayaan, atau tindakan seseorang. Sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengubah sesuatu yang lain juga disebut sebagai pengaruh.[9]

[9] Yahya Afandi, 'Gereja Dan Pengaruh Teknologi Informasi "Digital Ecclesiology"', *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 1.2 (2019), 270–83.

2. Pendapatan Asli Daerah : adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berasal dari berbagai sumber yang ada di daerah tersebut.
3. Pertumbuhan Ekonomi : diartikan sebagai kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan judul skripsi ini membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi di tahun1994-2023.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keadaan perekonomian negara yang baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai berkat campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ditempuh. Indikator tingkat petumbuhan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat meningkat, kondisi ekonomi stabil, daya beli masyarakat meningkat, dan kesenjangan pendapatan berkurang.[10]

Perbaikan jangka panjang kondisi ekonomi suatu negara menuju keadaan yang lebih baik disebut pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa kasus, istilah "pertumbuhan ekonomi" sering disebut sebagai "perkembangan ekonomi", dengan perkembangan ekonomi lebih berkaitan dengan masalah negara-negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih berkaitan dengan masalah negara maju. Namun, secara prinsip, kedua istilah ini sama-sama mencakup pertumbuhan ekonomi, sehingga di negara-negara berkembang, istilah-istilah ini tidak perlu dibedakan.

Sebagian besar ekonom setuju bahwa pertumbuhan ekonomi (atau perkembangan ekonomi) didefinisikan sebagai peningkatan output barang, bahan, dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain,

[10] Sari, Kartika. 2019. *Ruang Lingkup Ekonomi Makro*. Klaten: Cempaka Putih. hal. 15

pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi ekonomi sebuah negara, yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan nasional. [11]

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Dari definisi tersebut terdapat tiga komponen, yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang.
b. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk

[11] Hasyim ,Ali Ibrahim. 2017. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana. hal 231

c. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.
d. Teori pertumbuahn ekonomi sebagai penjelasan mengani faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per-kapita dalam jangka Panjang, dan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu:

a. Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita
b. Peningkatan produktivitas
c. Laju perubahan stuktural yang tinggi
d. Urbanisasi
e. Ekspansi negara maju
f. Arus modal, dan orang antar bangsa.[12]

Suatu perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika imbalan atas penggunaan faktor produksi lebih besar pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam jangka waktu tertentu.

Para ahli ekonomi percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah cara terbaik untuk mengukur kemajuan ekonomi sebuah wilayah, negara, atau

[12] Zulaikah & Anas Malik. 2023. *Ekonomi Makro Islam*. Malang: Litnus. Hal. 175

bangsa. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonominya melalui investasi di sektor infrastruktur dan sektor produktif ekonomi lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas, pembangunan infrastruktur akan mempermudah mobilitas arus barang dan jasa antar lokasi. Produk domestik regional bruto (PDRB) akan meningkat sebagai hasil dari peningkatan produktivitas, yang diukur berdasarkan jumlah output barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam analisis ekonomi perlu dibedakan arti dari keduanya. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita dengan menghitungkan adanya pertambahan pendapatan dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. [13]

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Robert Solow dari Massachusetts Institute of Technology dan Trevor Swan dari Universitas Nasional Australia adalah ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini. Baik Solow maupun Swan mengembangkan model pertumbuhan yang mirip dengan model Harrod-Domar, namun teori Solow-Swan didasarkan pada empat asumsi berikut: tenaga kerja, atau jumlah penduduk, tumbuh dengan kecenderungan

[13] Zulaikah & Anas Malik. 2023. *Ekonomi Makro Islam*. Malang: Litnus. Hal. 177

tertentu, semua tabungan masyarakat diinvestasikan, dan, fungsi produksi Q = f (K,L) berlaku untuk setiap periode, yang berarti bahwa untuk menghasilkan suatu produksi dapat digunakan berbagai kombinasi modal K dan tenaga kerja L.

Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan penyediaan faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Teori ini didasarkan pada asumsi analisis klasik bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat kerja penuh *(full employment)* dan peralatan modal akan tetap digunakan sepenuhnya sepanjang waktu. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi akan bergantung pada peningkatan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

Selanjutnya, rasio modal output (COR) dapat berubah. Ini berarti bahwa jumlah modal yang berbeda dan jumlah tenaga kerja yang berbeda dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Jika modal digunakan lebih banyak, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, dan sebaliknya. Aksesibilitas ini menunjukkan bahwa ekonomi memiliki kebebasan tak terbatas untuk menggabungkan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan tingkat output tertentu.[14]

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Solow Swan juga menjelaskan dimana penerimaan daerah termasuk akumulasi modal dalam mendanai faktor-faktor produksi. Output berupa barang dan jasa akan meningkat

[14] Hasyim ,Ali Ibrahim. 2017. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana. Hal.244

ketika pendapatan asli daerah meningkatkan dalam mode akumulasi modal untuk pembiayaan maupun investasi.[15]

3. Variabel Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya yang mmempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada tiga faktor, yaitu:

a. Faktor Penawaran *(Supply Factors)*

Dari sisi faktor penawaran, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan ukuran dan kualitas tenaga kerja. Faktor SDM, seperti halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, karena subjek pembangunan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan proses pembangunan.

2) Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam (SDA) merupakan barang-barang ekonomi seperti minyak, kayu, dan lain-lain yang dapat dihasilkan dari lingkungan. Sebagian besar negara berkembang bergantung pada SDA untuk melaksanakan proses pembangunan, tetapi SDA sendiri tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi tanpa

[15] Siregar, Syahdan Abdul Haris. Pertumbuhan Ekonomi Tahun and others, 'Jdess 02.01.2023', 2.1 (2023), 194–204.

didukung oleh kemampuan tenaga kerja manusianya untuk mengelola SDA yang tersedia. SDA yang dimaksud di anatarnya seperti kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3) Stok Modal

Stok modal atau sumber daya modal jumlah nilai dari lahan tempat usaha, bangunan, bahan, peralatan, mesin dan lain-lain membantu manusai mengeksploitasi SDA. Untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas Iptek, diperlukan stok modal. Barang modal memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, yang menjadikannya penting bagi kelancaran pembangunan ekonomi.

4) Kewirausahaan

Kewirausahaan berhubungan dengan penemuan inovasi yang membantu memecahkan masalah inefisiensi, karena itu dapat memfasilitasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produksi.

5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menunjukkan Teknik-teknik yang produktif dari tenaga kerja yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang semakin pesat, pola kerja telah berubah dari menggunakan tangan manusia ke menggunakan mesin canggih. Ini berdampak pada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas berbagai

aktivitas pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat.

b. Faktor Permintaan *(Demand Factors)*

Seperti yang dapat diketahui, ekonomi pasar bebas tidak dapat berkembang tanpa permintaan barang tambahan yang dapat dihasilkan oleh perekonomian. Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, investasi akan menurun, yang mengurangi dampak komponen pertumbuhan lainnya. Pengangguran akan muncul, insentif untuk kemajuan teknologi akan berkurang, dan perekonomian akan mandek.

Untuk menghasilkan stimulus ekonomi yang cukup, perubahan pada faktor permintaan harus diikuti oleh perubahan pada faktor penawaran. Kapasitas pasar, tingkat pendapatan konsumen, selera, dan kebutuhan adalah semua faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri.

Banyak negara akan melihat peningkatan pasar industri sebagai akibat dari ledakan rintangan perdagangan global yang terus-menerus. Contohnya, dibandingkan dengan konsumsi domestik, Italia mengekspor banyak sepatu ke Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika Serikat telah mengekspor banyak mesin dan produk pertanian ke pasar asing.

Meluasnya pasar, karena meningkatnya populasi domestik atau karena peningkatan perdagangan antar negara, menstimulasi investasi dan meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan pendapatan. Hal ini

juga memungkinkan skala ekonomi terjadi, meningkatkan produkitivitas dan standar hidup.

c. Faktor-faktor non-Ekonomi

Ekonom telah lama menyadari fakta bahwa kebudayaan suatu negara memengaruhi kecenderungan pertumbuhan ekonomi. Tradisi sosial dan agama dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan ekonomi. India tidak akan dapat mengembangkan industri pemrosesan daging sapi karena agama Hindu melarang pemotongan sapi karena hewan tersebut disakralkan.

Organisasi sosial kadang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara-negara feodal Eropa abad pertengahan menghambat kemajuan ekonomi, karena mengancam struktur kekuasaan. Setelah revolusi sosial dan politik pada abad-18 dan 19, golongan menengah yang kuat mendominasi kepentingan perdagangan komersial dan disusul oleh revolusi industri.

Argumentasi ini bertentangan dengan contoh perkebunan karet rakyat di Indonesia dahulu, yang menunjukkan respons terhadap mekanisme harga dan produksi karet meningkat ketika pedagang menawarkan barang industri sederhana seperti pakaian dan sepeda. Oleh karena itu, ukuran respons terhadap dorongan pertumbuhan ekonomi tertentu dapat diamati dalam berbagai kultur, dan ekonom modern berpendapat bahwa teori pertumbuhan ekonomi dapat diterima pada kultur yang berbeda.

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan di antaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.[16]

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDRB), yang juga disebut sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional, termasuk pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Di sisi lain, PDRB menunjukkan output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian regional. Dua jenis PDRB adalah PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga tahun berjalan untuk menghitung nilai tambah ouput, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun dasar tertentu. Maka dari itu, pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh perbedaan harga antar waktu telah dihilangkan. Tujuan PDRB adalah untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam jumlah uang tunggal selama periode waktu tertentu.

[16] Hasyim, Ali Ibrahim. 2017. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana. hal. 258-260

Teori kesenjangan memprediksi bahwa selisih antara negara atau daerah kaya dan miskin akan terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi baik di tingkat negara maupun regional. Masalah ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan per kapita negara sedang berkembang sebagai akibat dari ledakan pertumbuhan penduduk secara regional dan nasional. [17]

5. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Teori ekonomi Islam klasik menekankan pertumbuhan ekonomi. Kita percaya bahwa Allah SWT menciptakan kita sebagai hamba untuk menjaga tubuh kita, seperti yang disebutkan dalam ayat 61 Surat Hud, *"Dia yang menciptakanmu dari debu dan membuatmu bahagia."* Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib pernah menasihati seorang gubernur Mesir untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dalam hal pemungutan pajak. Ia menyatakan bahwa pengoptimalan pajak hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, dan karena itu, menaikkan pajak di negara yang makmur dapat berpotensi menghancurkan negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai komponen penting dari perspektif Islam karena Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai tren yang berkelanjutan yang dihasilkan dari komponen produksi yang signifikan dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan

[17] Apridar, Nasir, Abd.Jamal. 2019. *Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi; Analisis Pasca pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*,. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal.16

manusia. Meskipun keterbatasan yang disebabkan oleh faktor produksi dapat berdampak buruk dan fatal pada manusia, terutama dalam produksi barang dan jasa, mereka seharusnya tidak dipahami sebagai penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Perubahan ekonomi juga mencakup aktivitas produktif, yang sangat terkait dengan pemerataan distribusi. Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan manusia, pertumbuhan biasanya terjadi pada skala yang lebih besar, baik dari segi material maupun spiritual.

Menurut Islam, pembangunan ekonomi memiliki banyak aspek dan menekankan bahwa standar kuantitatif dan kualitatif sangat penting. Kesejahteraan duniawi dan akhirat adalah tujuan pembangunan. Menurut keyakinan Islam, setiap orang harus dilayani secara adil.[18]

Pembangunan dalam perspektif Islam pada dasarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan haruslah meliputi dan bersifat multidimensi dan potensi kemanusiaan dan pembangunan masyarakat secara merata bagi semua golongan dan lapisan masyarakat. Pembangunan haruslah bersifat menyeluruh meliputi semua bidang kehidupan (multi-dimensional) dan sekaligus terpadu *(integrated)*, yaitu pembangunan yang mencangkup dimensi kerohanian dan materi/kebendaan yang dilaksanakan secara terpadu (integral) dalam berbagai dimensi. Terpadu dalam arti tetap mengarah pada peng Esa-an, pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT (Tauhid).[19]

[18] Eza Okhy Awalia Br Nasution and others, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Journal of Management and Creative Business*, 1.1 (2023), 63–71.

[19] Amir, Amri. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jambi: WIDA Publishing. hal.29

Pertumbuhan ekonomi dalam islam menjadikan variabel zakat sebagai identitas sosial islam masuk sebagai fungsi atas ekonomi yang tumbuh di masyarakat. Zakat dalam islam berperan dalam mendorong perputaran ekonomi dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin. Dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi sehingga memperkecil jarak antara orang kaya dan miskin. Zakat yang dikeluarkan masyarakat muslim kaya meningkatkan daya beli masyarakat dhuafa, sehingga akan meningkatkan konsumsi dan investasi masyarakat maupun kesempatan menabung pada masa berikutnya. Daya beli yang dimiliki masyarakat akibat zakat memberikan dampak pada kesempatan perputaran ekonomi.[20] Ada 4 tujuan utama ekonomi pembangunan Islam, yaitu:

a. Menjamin kebutuhan dasar manusia

Semua manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Tanpa kebutuhan ini sangat tidak mungkin untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini sering juga dikenal dengan kebutuhan primer/pokok. Kebutuhan ini sering dipresentasikan dari adanya akses terhadap pangan, sandang, dan papan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan di dalam Islam harus ditujukan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan ini bagi seluruh kalangan masyarakat.

[20] Hasibuan, Sri Wahyuni, dkk. 2022. *Ekonomi Makro Islam*. Yogyakarta: Nuta Media. hal. 111

b. Meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia

Tujuan kedua ekonomi pembangunan Islam yang sesuai dengan tujuan maqashid syariah adalah untuk melindungi jiwa dan akal. Pemenuhan kebutuhan jiwa dapat dilakukan dengan mengarahkan pembangunan untuk menjamin sistem kesehatan yang memadai, ruang untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan untuk berpendapat, serta melakukan pengembangan diri baik jasmani, emosional maupun intelektual.

c. Menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang

Dalam prinsip ekonomi pembangunan Islam, pembangunan tidak hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan nilai ekonomi (output) untuk satu periode tertentu saja. Pembangunan juga harus memastikan agar output di kemudian hari tetap terjaga. Tujuan ekonomi pembangunan Islam dalam konteks ini sejalan dengan paradigma pembangunan kontemporer, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu tujuan pembangunan ekonomi Islam yang ketiga ini juga sesuai dengan tujuan maqashid syariah yang melindungi keturunan.

d. Menumbuhkan dan menjamin spiritualitas

Mengingat salah satu orientasi ekonomi pembangunan islam adalah dimensi dunia akhirat sekaligus, maka salah satu tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah menumbuhkan dan menjamin terjaganya spiritualitas masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan maqashid syariah yaitu melindungi agama. Agama

tidak hanya berperan sebagai pedoman tetapi juga sekaligus menjadi objek pembangunan. Melindungi agama pada dasarnya juga melindungi kepentingan manusia. Pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan sebuah agama merupakan bagian dari hak asasi. Selain itu tujuan ini juga merupakan salah satu dari *subjective well-being*. Tujuan pembangunan dalam konteks ini merupakan bagian dalam menciptakan kebebasan dan menumbuhkan kebahagiaan pada diri manusia. Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri, salah satunya adalah kebutuhan spiritual.[21]

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam pengertian politik, otonomi diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan *intern* daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah *intern* tanpa diintervensi oleh pihak lain. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan kata "daerah", maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri. Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi lebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan negara yang dianut.

[21] Mahri, Jajang,dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. hal. 132-135

Istilah otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomous* yang berarti “hukum” atau “peraturan”. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Otonomi daerah berarti kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.

Pengertian "otonom" secara etimologis adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dalam daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Sarundajang menyatakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya adalah:

a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintahan (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah "sendiri" dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga, merupakan inti keotonomian suatu daerah.
b. Dalam kebebsan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya.
c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.[22]

Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (daerah

[22]Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum dan hak Asasi Manusia era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. hal. 116-119

otonom) menurut Prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat setempat (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1)). Yang dimaksud dengan kewenangan daerah tersebut adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidan lain (seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara sebagaimana tercantum dalam pasal 7.

Mengenai bidang pemerintahan yang wajib dilakukan oleh daerah kabupaten kota itu adalah meliputi pekerjaan umum, Kesehatan, perhubungan, Pendidikan, industry, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, peternakan, koperasi dan tenaga kerja (pasal 11). Selanjutnya daerah berwenang mengelola sumber daya dan bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan (pasal 10).

Tugas pemerintah daerah adalah melayani masyarakat. Dengan kehidupan yang aman dan tentram maka masyarakat akan dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara proaktif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi, yaitu:

a. Fungsi pengaturan
b. Fungsi pemberdayaan

c. Fungsi pelayanan

Fungsi pengaturan ditunjukkan melalui adanya peraturan daerah (Perda). Fungsi peraturan yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah adalah berkaitan dengan kepentingan daerah yang bersangkutan sepanjang berada dalam ruang lingkup urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga sendiri, atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa fungsi pengaturan yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah adalah meliputi hal-hal yang berada di dalam jangkauan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Fungsi kedua adalah fungsi pemberdayaan. Dengan adanya tuntutan pemerintah daerah agar semakin mandiri, maka pemberdayaan di tingkat organisasi/instansi yang dapat dilakukan adalah menentukan dinas-dinas yang dimiliki daerah adalah yang mampu menghasilkan dana, dan yang tidak mampu adalah merupakan beban bagi Pemda (misalnya Dinas Sosial). Agar diupayakan penyediaan dana untuk dinas-dinas yang mampu menghasilkan dana harus lebih besar dibandingkan dengan dinas yang tidak mampu menghasilkan dana. Secara total, dana yang dihasilkan adalah lebih besar di bandingkan beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan antara lain dengan memberikan rangsangan sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti pemberian subsidi kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk

melaksanakan program yang telah dirancang, sehingga masyarakat lebih berpartisipasi dalam fungsi pemberdayaan. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta untuk melakukan pembangunan.

Fungsi ketiga adalah melakukan pelayanan. Dinas-dinas diharapkan lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat disamping itu harus lebih didorong untuk menghasilkan dana (lihat secara keseluruhan dinas yang ada). Pihak legislatif, DPRD dapat meningkatkan perannya yaitu menampung aspirasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan.

Penyelenggaraan fungsi daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai dari atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasal 78.

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka desentralisasi adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi:
    1) Hasil pajak daerah
    2) Hasil retribusi daerah
    3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    4) Lain-lain PAD yang sah
b. Dana perimbangan

c. Pinjaman daerah

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan dana yang tersedia sebagai akibat terbatasnya potensi yang dimiliki maupun keterbatasan kemampuan dalam mengelola potensi yang ada. Di lain pihak pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai.

Pendapatan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan otoda (Otonomi daerah), yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah terdapat tuntuan untuk meningkatkan penerimaan PAD. Agar diupayakan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah *(revenue improvement)*. Disamping "peningkatan penerimaan pendapatan daerah" terdapat pilar utama yang kedua yaitu "pembangunan kelembagaan daerah" *(local institutional development)*. Pembangunan kelembagaan daerah meliputi aspek-aspek strukutr organisasi mekanisme, dan prosedur, sumber daya manusia (staf apparat Pemda) dan ketersediaan prasarana dan sarana (peralatan kantor, operasional, perangkat lunak dan perangkat keras).[23]

[23] Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Expert. hal.206-208

Adapun kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
f. Sosial

Selain itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, adalah:

a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak
c. Pangan
d. Pertanahan
e. Lingkungan hidup
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. Pemberdayaan masyarakat desa
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan informatika
k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
l. Penanaman modal

m. Kepemudaan dan olahraga
n. Statistik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan
r. Kerasipan

Selain urusan-urusan wajib tersebut, masih ada urusan pilihan yang bisa diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yaitu urusan:

a. Kelautan
b. Pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
e. Energi dan sumber daya mineral
f. Perdagangan
g. Perindustrian
h. Transmigrasi

Penetapan kebijakan pembangunan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 76, merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.[24]

2. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut beberapa ahli, tujuan otonomi daerah secara sederhana adalah sebagai berikut:

a. Desentralisasi dalam kerangka NKRI adalah untuk menjaga stabilitas politik dalam mengahadapi adanya tuntutan akan usaha pemisahan diri dari ikatan NKRI. Dari sisi pelayanan, memudahkan pelayanan kepada publik. Argumentasi klasik mengatakan bahwa daerah akan lebih mengetahui kondisi keamanan, kekurangan, dan karakteristik daerah dibandingkan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan faktor kedekatan fisik yang akan memudahkan masyarakat lokal untuk menyelenggarakan pelayanan secara bertanggung jawab.
b. Otonomi daerah adalah upaya untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan masyarakat melalui pemanfataan dan pendayagunaan seluruh sumber daya, aset, dan potensi sumber daya yang ada di daerah. Maksudnya adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana sumber daya alam, infrastruktur, pendapatan, pelayanan/pembelanjaan, pengeluaran otonomi daerah, akan

[24]Afandi, Muhammad Nur, dkk. 2022. *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Deepublish. hal. 57-61

menimbulkan rasa saling ketergantungan yang bersifat adil, jujur dan terbuka dari otonomi daerah atau kawasan atau wilayah.

c. Tujuan otonomi daerah juga untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan, namun bukan pemekaran daerah.

Adapun manfaat dari otonomi daerah adalah:

a. Pemberian pelaksanaan otonomi daerah adalah sangat tergantung pada kemauan, kemampuan aparatur dalam mengelola dan memperoleh daftar serta mengorganisasikan manusianya sebagai aktor dalam membiayai kegiatan dan manusia sebagai actor dalam proses pelaksanaan otonomi daerah.
b. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan serta tepat berdasarkan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan hasilnya secara agregat akan lebih optimal. Hal ini yang perlu mendapat perhatian adalah terciptanya *equality* berupa horizontal *equity* maupun *within state equity*.[25]

3. Desentralisasi

Desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua istilah yang memiliki arti yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Desentralisasi berkaitan dengan sistem pengelolaan (negara), sedangkan

[25] Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum dan hak Asasi Manusia era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. hal.124-125

otonomi berkaitan dengan kemandirian dalam mengelola sebagai implementasi.

Secara etimologis istilah "desentralisasi" berasal dari Bahasa latin, *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Desentralisasi berarti melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah melimpahkan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian secara leksikal kata desentralisasi merupakaan lawan atau kebalikan dari kata sentralisasi, yang menunjukkan kekuasaan atau kewenangan pemerintahan yang terpusat pada pemerintahan pusat.

Secara umum desentralisasi memiliki dua aspek yaitu aspek politik dan dari aspek hukum administrasi. Dari aspek politik desentralisasi biasanya diartikan sebagai penyerahan kekuasaan *(power)* kepada institusi di tingkat bawah, sedangkan dari aspek hukum tata negara/ administrasi desentralisasi diartikan sebagai penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan.

Secara teoretik hakikat desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan atau pembagian urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah, dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian hakikat desentralisasi cenderung kepada efisiensi dan efektifitas aspek administrasi pemerntahan.

Tujuan utama desentralisasi di Indonesia sejak tahun 1999, di satu pihak, untuk membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang

tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil menfaat dari padanya.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkosentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan megalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas daerah akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Tentu saja dalam kemandirian dan pemberdayaan daerah ini ada batas-batasnya, seperti tidak boleh melanggar konstitusi, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan atau kepentingan umum.

Kemandirian daerah tidak berarti lepas sama sekali dari pemerintah pusat, sehingga sebebas-bebasnya membuat aturan dan melaksanakan semua urusan pemerintahan. Apalagi dalam konteks negara kesatuan, desentralisasi harus dilaksanakan secara sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat, karena tidak mungkin semua urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah atau sebaliknya. Urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara lazimnya diselenggarakan secara sentralisasi dan dekonsentrasi, sedangkan urusan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara desentralisasi.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. Dari sisi teknik organisatoris pemerintahan, oleh The Liang Gie dikatakan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien, atau yang menurut Zudan Arif Fakrullah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dilihat dari sisi pelaksanaan fungsi pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah itu menunjukkan:

a. satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
c. satuan-satu desentralisasi lebih inovatif dan
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.[26]

C. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

[26]Akib, Muhammad. 2021. *Hukum Lingkungan, Perspektif otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 1-8

Keuangan daerah adalah istilah yang merujuk pada pengelolaan keuangan pemerintah di tingkat daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Konsep ini melibatkan pengumpulan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban terhadap sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), keuangan daerah merupakan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pertanggung jawaban, dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ini mencakup pengelolaan pendapatan daerah, pengeluaran daerah, pembiayaan, dan tata kelola keuangan daerah secara umum.

Pengertian keuangan daerah tersebut mencakup aspek-aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ini membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dengan efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

2. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Fungsi pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemerinthaan dan pelayanan pada masyarakat.

Kompetensi dan kapabilitas pengelola keuangan, yang ditunjang oleh tim yang solid akan menghasilkan keseimbangan yang harmonis dalam memperoleh, menggunakan, mencatat, sampai kepada melaporkan sumber daya keuangan yang dikelola. Sejalan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan berbasis desentralisasi, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mendelegasikan tugas-tugas pengelolaan keuangan sampai level unit kerja yang paling kecil. Akan tetapi dalam menentukan pendelegasian wewenang dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya pendukungnya. Sehingga pelaksanaan desentralisasi tidak menimbulkan permasalahan baru yang disebabkan ketidaksiapan dari berbagai komponen sistem terkait.

Lingkup keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
c. Penerimaan daerah
d. Pengeluaran daerah
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/ atau kepentingan umum.

Pada konteks perencanaan daerah, perencanaan merupakan proses penyusunan visi, misi dan program dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien serta mempertimbangkan aspek berkelanjutan dari ketersediaan sumber daya tersebut. Proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan melalui beberapa proses sebagai berikut:

a. Proses politik. Pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM.
b. Proses teknokratik. Perencanaan dilakukan oleh perencanaan professional atau lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan.
c. Proses partisipatif. Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholder), yaitu melalui Musrenbang.
d. Proses *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Perencanaan yang aliran prosesnya dilakukan oleh pemerintahan yang cakupannya lebih luas kepada pemerintah yang cakupannya lebih kecil dan aliran proses yang

dilakukan dengan pemerintah yang cakupannya lebih kecil mengajukan kepada pemerintah yang cakupannya lebih luas.[27]

Terdapat beberapa langkah penting yang dapat diambil dalam memahami dan mengelola keuangan daerah secara efektif, antara lain:

a. Peningkatan Sistem Informasi Keuangan: Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem informasi keuangan untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Implementasi teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam mengelola informasi keuangan daerah. Hal ini akan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas.
b. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Internal: Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini meliputi peningkatan pengawasan terhadap proses pengelolaan anggaran, pengendalian atas penggunaan dana, pemisahan tugas yang jelas, serta penerapan mekanisme audit internal yang efektif. Pengawasan dan pengendalian yang kuat akan mengurangi risiko penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah.
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam

[27] Afifah, Nunuy nur, dkk. 2020. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana. hal.5-6

pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pendidikan yang tepat diperlukan agar para pegawai dapat memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, menguasai teknik-teknik pengelolaan keuangan yang efektif, serta memahami peraturan dan kebijakan terkait. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan berdampak positif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

d. Kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menjalin komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat untuk memahami kebijakan fiskal, transfer dana, dan peraturan terkait keuangan daerah. Sinergi antara kedua pihak akan meningkatkan koordinasi, mendukung pemahaman yang lebih baik, dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.
e. Adopsi Praktik Terbaik: Pemerintah daerah dapat belajar dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang berhasil diimplementasikan di daerah lain. Melalui studi kasus dan benchmarking, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal. Praktik terbaik ini mencakup kebijakan pengelolaan anggaran, pengawasan internal, tata kelola keuangan yang baik, dan penggunaan teknologi informasi yang modern. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat memperbaiki pemahaman

dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan landasan yang penting dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Referensi yang disebutkan di atas dapat menjadi sumber informasi yang berguna dalam memahami teori dan praktik pengelolaan keuangan daerah.

3. Sumber-Sumber Penerimaan Keuangan Daerah

Pendapatan keuanagan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mengelola keuangan daerah. Berikut adalah sumber-sumber pendapatan keuangan daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, serta pendapatan lain yang sah dan halal.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Bantuan dan Hibah

Pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendapatan dari bantuan dan hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat, lembaga internasional, atau pihak lain. Bantuan dan hibah ini dapat berupa dan untuk pembangunan, program sosial, atau penganggulangan bencana.

d. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan keuangan daerah yang berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh pendapatan lainnya adalah hasil penjualan aset, pendapatan dari pelayanan publik, dan pendapatan dari investasi daerah. Pengelolaan pendapatan keuangan daerah perlu dilakukan secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan daerah. Referensi yang disebutkan di atas dapat menjadi acuan yang berguna dalam memahami sumber-sumber pendapatan keuangan daerah secara lebih mendalam.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. APBD merupakan dokumen keuangan yang menggambarkan estimasi pendapatan dan rencana pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode waktu tertentu. APBD harus

disusun berdasarkan prinsip-prinsip keuangan negara yang meliputi transparansi, akuntabilitas, keterukuran, keberlanjutan, dan keadilan.

Pendapatan daerah dalam APBD mencakup sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, bantuan dan hibah, serta pendapatan lain yang sah. Pendapatan ini harus disusun secara realistis dan sesuai dengan potensi keuangan daerah.

Pengeluaran daerah dalam APBD meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung mencakup biaya administrasi, pengeluaran pemeliharaan, dan transfer ke daerah lain.

Penyusunan APBD melibatkan tahapan-tahapan seperti perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat, koordinasi antar instansi, serta evaluasi terhadap capaian target dan kinerja keuangan daerah. APBD merupakan alat yang penting dalam mengelola keuangan daerah dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Referensi yang disebutkan di atas dapat menjadi acuan yang berguna dalam memahami teori dan praktik penyusunan APBD serta pengelolaan. keuangan daerah secara lebih mendalam.[28]

5. Pembangunan Daerah

[28] Nadjib, Abdul. 2023. *Keuangan Negara dan Daerah*. Jawa Barat: Penerbit Adab. hal. 173-184

Masing-masing daerah memiliki variasi yang berbeda-beda dalam potensi sumber daya alam yang dimilikinya, sumber daya manusia, perkembangan ekonomi, kesempatan kerja, ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial dan lainnya.

Daerah yang termasuk dalam kategori lebih potensial mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan sumber daya yang dimiliki secara secara maksimal atau secara berlebihan dalam jangka pendek untuk memperoleh penerimaan pendapatan daerah yang sebesar-besarnya dan enggan untuk mneyebarkan atau membaginya kepada daerah tetangga yang termasuk kurang potensial sehingga kesenjangan anatar kedua daerah tetangga tersebut menjadi bertambah besar. Daerah yang potensial tidak memanfaatan potensi sumber dayanya secara berlebihan sehingga dalam jangka panjang tetap terjaga kelestariannya. Kesenjangan terhadap daerah tetangga yang kurang potensial menjadi tidak terlalu besar, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan spasial yang tajam. Salah satu sasaran pengembangan wilayah adalah mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.

Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah itu tidak berarti dapat dimanfaatkan secara sebebasbebasnya, tetapi harus memperhatikan pula kepentingan kabupaten-kabupaten tetangga *(neighbouring regencies)*. Pengembangan wilayah itu esensinya bukan menekankan pada pandangan pada masing-masing daerah, tetapi yang lebih diutamakan adalah interaksinya antar

daerah untuk mencapai kesenjahteraan masyarakat yang lebih tinggi, artinya melibatkan beberapa daerah, yaitu daerah-daerah yang bertetangga, atau daerah-daerah yang terletak di sekitarnya.

Dikaitkan dengan pengembangan wilayah, desentralisasi pembangunan dilakukan ke seluruh daerah otonom. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk memperkuat pembangunan nasional, dan pembangunan nasional diartikan untuk mendorong pembangunan daerah. Keduanya saling mengisi dan menunjang. Dalam masyarakat luas pengertian otonomi daerah dan desentralisai sering disamakan pengertiannya, sedangkan keduanya adalah berbeda. Pengertian otonomi daerah mempunyai konotasi mengenai aspek politik, sedangkan desentralisasi lebih cenderung terkait dengan aspek administrasi negara, yaitu mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah.

Terdapat kekhawatiran bahwa otonomi daerah akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Keinginan Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan semaksimal mungkin, dampaknya akan merusak lingkungan. Kerusakan amat parah, misalnya kerusakan hutan, penggusuran sawah untuk pembangunan industri dan lainnya. Otonom adalah tuntutan demokrasi dan pengelolahan lingkungan hidup harus mengalami demokratisasi. Masyarakat daerahlah yang paling

mengetahui pembanguan dan persepsi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.[29]

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD, yang berasal dari sumber penerimaan daerah. Ini termasuk pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber lain. Untuk melaksanakan pembangunan di daerah, diperlukan dana yang signifikan. Karena itu, daerah tidak dapat hanya bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Oleh karena itu, daerah harus memaksimalkan potensi daerahnya untuk digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan selama era otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan.

PAD dapat digunakan untuk menilai seberapa mandiri pemerintah daerah dalam hal keuangan.[30] Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, PAD harus terus ditingkatkan sebagai sumber penerimaan daerah sendiri. Ini perlu dilakukan setiap tahun untuk menanggung sebagian besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

---

[29] Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Expert. hal.210-213

[30] Christofel Supit Watulingas Alvonsus, Paulus Kindangen, and Daisy SM Engka, 'Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.3 (2018), 104–17.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah sebagai hasil dari desentralisasi, yang berarti bahwa pemerintah memberikan wewenang pemerintahan kepada daerah yang diberi otonomi untuk mengelola dan mengelola urusan pemerintahan di bawah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[31] PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi, perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan daerah, serta PAD lainnya yang sah. PAD adalah hasil pajak, retribusi, perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan daerah.[32] Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1. Pajak Daerah

   Pajak daerah adalah iuran wajib yang ditujukan kepada individu atau organisasi tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.[33]

2. Retribusi Daerah

   Retribusi adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan

[31] Geralda J.P Sulung, Een N. Walewangko, and Irawati Masloman, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara', *Jurnal Berkala Efisiensi*, 22.5 (2022), 109–20.

[32] Nurul Arbila, Yani Rizal, and Iskandar Iskandar, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu', *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2.4 (2022), 240–49.

[33] Iba Gunawan and Suebah Suebah, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Serang', *Journal Management Retail*, 02.1 (2022), 54–77.

oleh negara kepada penduduknya. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Sumber PAD juga mencakup kompensasi atau izin yang diizinkan oleh undang-undang. Salah satu jenis penerimaan daerah adalah retribusi daerah, yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

   Hasil pengelolaan daerah yang sah adalah pendapatan dari keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Potensi BUMD untuk menjadi sumber PAD termasuk perusahaan daerah seperti perusahaan air minum bersih (PDAM), bank pembangunan daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan dan rekreasi, villa, pesanggrahan, dan percetakan. bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah adalah hasil dari pengelolaan kekayaan daerah.[34]

[34] Alvonsus, Christofel Supit Watulingas, Paulus Kindangen, and Daisy SM Engka, ‘‘Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara’, *Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.3 (2018), 104–17

E. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemandirian daerah adalah tujuan utama dari desentralisasi fiskal. Diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat memperoleh sumber keuangan lokal, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dengan PAD yang meningkat memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. PAD adalah sumber pembelanjaan daerah, sehingga dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan meningkat dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat.[35]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterahkan masyarakatnya, dan peningkatan PAD menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. PAD dihasilkan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang telah dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dalam upaya membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.[36]

Peningkatan PAD dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar PAD, lebih banyak kegiatan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Nilai PDRB pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Ini karena pemerintah daerah mampu

---

[35] Romi Daniel Tuwo, Debby Christina Rotinsulu, and George M.V Kawung, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21.4 (2021), 79–90 .

[36] Vivi Oktavia and Dewi Zulvia, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2021', *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2.2 (2023), 266–82.

memanfaatkan dengan efektif PAD yang lebih besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar PAD, semakin besar otonomi dan kemandirian pemerintah daerah.[37]

F. Penelitian Terdahulu

Penulis memulai dengan mengamati serta melihat peneltian terdahulu yang berhubungan serta berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Sehingga, peneliti mendapat acuan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, dengan melakukan pengamatan pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal menganai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Setelah peneliti mengamati penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, antara lain:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Eka Sri Mulyani,dkk (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi	Semakin besar PAD Provinsi Kalimantan Timur, semakin besar pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari berbagai sumber

[37] Siti Dini, Eva Agustina Br. Tarigan, and Melva Nava Abeliana Siregar, 'Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh', *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4.2 (2021), 65–80.

		Kalimantan timur tahun 2001-2020	pendapatan, seperti pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan yang sah lainnya. Oleh karena itu, PAD akan meningkat dan modal akan meningkat dari sisi pendapatan pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berdampak positif pada masyarakat. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
2.	Siti Dini, dkk (2021)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	PAD berpengaruh positif serta signifikan secara parsial pada pertumbuhan ekonomi dikabupaten atau kota Provinsi Aceh. DAU tidak berpengaruh secara parsial pada pertumbuhan ekonomi dikabupaten atau kota Provinsi Aceh. DAK tidak berpengaruh secara parsial pada pertumbuhan ekonomi dikabupaten atau kota Provinsi Aceh. Belanja

			Modal tidak berpengaruh secara parsial pada pertumbuhan ekonomi dikabupaten atau kota Provinsi Aceh. PAD, DAU, DAK serta Belanja Modal berpengaruh signifikan secara simultan pada pertumbuhan ekonomi.
3.	Geralda J.P Sulung, dkk (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan secara teori terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun begitupun sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan secara teori terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila Dana Transfer meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun begitupun sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Transfer secara

			bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	Jefri Alfin Sinaga, dkk (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK tidak berpengruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
5.	Romi Daniel Tuwo, dkk (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten Minahasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten minahasa. Belanja Modal berpengaruh posistif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten minahasa. Secara bersama-sama PAD dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten minahasa.

6.	Suebah dan Iba Gunawan (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Serang	Hasil analisis data statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Serang. Dengan demikian, PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Serang.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini hanya berfokus menggunakan satu variabel independent (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel lain seperti : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, dan dana Tranfer. Penelitian ini menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data PDRB kota Bukittinggi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2023. Sedangkan persamaan penelitian ini berfokus menggunakan variabel dependen (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teoritis dan penelitian terdahulu, maka variabel independen (x) pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan variabel dependen (y) pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara variabel independent dan dependen digambarkan dalam kerangka berfikir di bawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban ini baru berdasarkan teori yang relevan, dan belum didukung oleh data empiris yang dikumpulkan. Berdasarkan kerangka penelitian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Mengasumsikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kota Bukittinggi.

$H_0 : \beta_1 = 0$

$H_a : \beta_2 \neq 0$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini bergantung pada data angka dan analisis statistik, pendekatan kuantitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan kuantitatif dimulai dengan konsep- konsep abstrak yang memberikan fokus pada landasan teori. Kemudian, hipotesis dibuat dan diuji untuk menjelaskan peristiwa nyata. [38]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah di Kota Bukittinggi, dengan periode waktu penelitian dimulai Februari sampai dengan selesai.

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

   Sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini menggunakan data sekunder, Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari berbagai sumber sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber-sumber ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, buku, laporan, jurnal, dan Badan Pusat Statistik (BPS).[39]

---

[38] Priadana, Sidik & Denok Sunardi. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Tangerang: Pascal Books. hal. 207

[39] Siyoto, Sandu & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media publishing. hal.68

2. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data pendapatan asli daerah (PAD), dan data PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga dari berbagai data internet yang berhubungan dengan penelitian.

D. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen (X) dan variabel dependen (Y)

1. Varaibel Independen (X) adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen (Y). Variabel Independen dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel independen ini adalah :

   Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi lokal dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat yang terdiri dari empat komponen utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Variabel Dependen (Y) adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

   Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu daerah atau negara yang tercermin dari naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, faktor-

faktor seperti investasi, konsumsi, pendapatan daerah, dan tenaga kerja berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

E. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi.mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu terkait data PAD dan PDRB Kota Bukittinggi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari situs website Badan Pusat Statistik (BPS).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik regresi linier sederhana untuk menganalisis data. Dalam model regresi linear sederhana, satu variabel dianggap sebagai variabel dependent (atau tak bebas) dan variabel independen (atau bebas). Hasil akhir dari analisis regresi linear adalah fungsi regresi populasi, yang dapat digunakan untuk membuat estimasi.[40]

G. Pengujian Model

1. Uji Statistik Deskriptif

   Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data yang dilihat dari nilai rata-rata *(mean)*, *standar deviasi, varian*, nilai minimum, nilai maksimum, *sum* dan *range.*

[40] Ansofino,dkk. 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta:Deepublish. Hal.21

2. Uji Asumsi Klasik

   Uji Normalitas

   Uji normalitas ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan pengambilan keputusan uji normalitas yaitu :

   1) Jika nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal.
   2) Jika nilai Asymp. Sig.(2-tailed) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3. Uji Regresi Linear Sederhana

   Regresi linear sederhana adalah analisis regresi yang melibatkan hubungan antara satu variabel tak bebas dihubungkan dengan satu variabel bebas. Regresi linier juga merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab-akibat antara variabel faktor penyebab (x) terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linier Regression) juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau pun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuntitas. Persamaan umum metode regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b\text{X}$$

Keterangan:

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Y= Variabel dependen (variabel tak bebas)

X = Variabel independen (variabel bebas).[41]

4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji t berfungsi untuk menjelaskan signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t dapat dilihat melalui dua acuan. Pertama, dengan memperhatikan nilai signifikansi yang diperoleh, yaitu:

a. Jika nilai Sig uji t < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen
b. Jika nilai Sig uji t > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen

Kedua dengan cara melihat perbandingan nilai t hitung dan t tabel, yaitu:

a. Jika nilai t hitung > t tabel maka hipotesis diterima

[41] Fransiskus Ginting, Efori Buulolo, and Edward Robinson Siagian, 'Implementasi Algoritma Regresi Linear Sederhana Dalam Memprediksi Besaran Pendapatan Daerah (Studi Kasus: Dinas Pendapatan Kab. Deli Serdang)', *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 3.1 (2019), 274–79.

b. Jika nilai t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak.[42]

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat besarnya hubungan yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas akan diikuti oleh variabel terikat pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square (R2). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi veriabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y.[43]

[42] Irma Susanti and Fazrina Saumi, 'Penerapan Metode Analisis Regresi Linear Berganda Untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas Pada Kasus Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Aceh Tamiang', *Gamma-Pi: Jurnal Matematika Dan Terapan*, 4.2 (2022), 38–42.

[43] Darma, Budi. 2021. *Statistika Penelitian Menggunakan Spps*. Jawa Barat: Geupedia. hal.53

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatra, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Kota ini berada pada ketinggian 909–941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C. Sementara itu, dari total luas wilayah Kota Bukittinggi saat ini (25,24 km²), 82,8% telah diperuntukkan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75–110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

2. Sejarah Kota Bukittinggi

Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat Pemerintahan Sumatera

bahagian Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan, bahkan Bukittinggi pernah berperan sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki Belanda dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949.

Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukittinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang dinamakan Gemetelyk Resort berdasarkan Stbl tahun 1828. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng "Fort De Kock". Kota ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini.

Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan komandan Militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam, di kota ini pulalah Pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Provinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing Keresidenan itu telah menjadi Propinsi-propinsi sendiri.

Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Propinsinya. Semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah pindah ke Padang, namun pada tahun 1978 secara de jure barulah Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan ibukota Propinsi Sumatera Barat ke Padang.

Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 menjadi Kota Bukittinggi.

3. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

VISI :

MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH.

MISI :

a. "HEBAT" Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.
b. "HEBAT" Dalam Sektor Pendidikan.
c. "HEBAT" Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
d. "HEBAT" Dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga.
e. "HEBAT" Dalam Tata Kelola Pemerintahan.
f. "HEBAT" Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
g. "HEBAT" Dalam Sektor Bidang Pertanian.
h. Humanis, Enterpreneur, Bijak, Agamais/Adil, Tauladan

4. Potensi

a. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan ditetapkan menjadi potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi, juga sejalan dengan fungsi dan kondisi alamiah Kota Bukittinggi dengan udaranya yang sejuk akan sangat mendukung bagi penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana didunia ini Kota Pendidikan itu adalah kota yang berudara sejuk.

Oleh karena itu, sejak dari zaman Belanda, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dijadikan sebagai tempat pendirian pusat-pusat pendidikan. Kita kenal dengan " sekolah Raja ",Fakultas Kedokteran Pertama, Sekolah Mosvia, Kweek School, Mulo, Sekolah Tata Praja (APDN), HIS dan

Ambach shcool. Dan pada Zaman awal kemerdekaan berdiri sekolah Polwan dan kadet serta Pamong Paraja yang pertama di Indonesia, bahkan Universitas Andalas yang saat ini berada di Padang, sebelumnya berada di Bukittinggi.

Dalam melestarikan bukti sejarah pendidikan tersebut, pemerintah kota Bukittinggi telah membangun Monumen Kadet dan Tugu Polwan serta melestarikan bangunan Pamong Paraja.

Peningkatan pelayanan pendidikan dijadikan sebagai salah satu agenda pembangunan ini tidak hanya pada pendidikan dasra dan menengah, tetapi juga pada pengembangan pendidikan tinggi yang berbasis aqidah. Melalui peletakan prioritas pembangunan pada peningkatan kualitas pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia secara bertahap akan dapat ditingkatkan dan pondasi pendidikan bertaraf internasional dapat diwujudkan.

Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai karena saat ini telah tersedia 34 Taman Kanak-kanak, 59 Sekolah Dasar, 10 SLTP, 15 SMU, 13 SMK dan 18 Perguruan Tinggi. Jangkauan pelayanan pendidikan tidak hanya untuk putra daerah Kota Bukittinggi saja, akan tetapi meliputi Wilayah Sumatera Barat bagian Utara, sebagian Riau, Sumatera Utara dan Jambi. Demikian juga tenaga guru/ dosen telah memadai sehingga prestasi akademik pelajar kota ini sangat membanggakan.

Dengan kondisi demikian maka ke depan orientasi pendidikan harus diupayakan bagaimana menciptakan kualitas akademik yang tinggi dibarengi dengan kualitas agama yang sempurna. Hal ini harus kita antisipasi karena dampak globalisasi akan menyebabkan pengaruh negatifnya merasuk ke rumah tangga. Untuk itu kedepan akan dikembangkan Pembangunan SDM berbasis Aqidah, maka pola pendidikan yang berbasis agama sudah dimulai sejak dini (dari kandungan).

b. Bidang Kesehatan

Kota Bukittinggi yang memiliki iklam sejuk ini memiliki peluang yang sangat besar sebagai kota pelayanan kesehatan dan peristirahatan. Kota dengan luas relative kecil ini telah memiliki 5 rumah sakit yaitu 3 buah milik pemerintah dan 2 swasta dengan didukung oleh 5 unit puskesmas non inpres yang tersebar ditiap kecamatan dan 6 puskesmas keliling serta 15 puskesmas pembantu. Keunggulan pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi ini adalah terdapatnya pusat pengembangan dan pelayanan stroke nasional yang merupakan satu-satunya di Indonesia.

Kondisi sarana dan prasarana yang relative memadai itu, berkorelasi positif dengan tingkat kujungan pasien, pada tahun 2004 sebanyak 259.196 orang tekah dating kerumah sakit yang da di Bukittinggi. Manurut daerah asalnya 46,26% penderita yang dirawat di rumah sakit Bukittinggi berasaldari luar dalam propinsi Sumatera Barat, 48,73% dari bukittinggi dan 5,01%berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat.

c. Bidang Kepariwisataan

Bidang Kepariwisataan ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi adalah berangkat dari kondisi alam dan geografis Kota Bukittinggi itu sendiri.

Kota bukittinggi saat ini mempunyai luas + 25.239 km 2 terletak ditengah-tengah Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 909 M – 941 M diatas permukaan laut. Suhu udara berkisar $17,1^0$ C sampai $24,9^0$C, merupakan iklim udara yang sejuk. Posisinya yang strategis merupakan segitiga perlintasan menuju ke utara, timur dan selatan Sumatera.

Topografi kota yang berbukit dan berlembah dengan panorama alam yang elek serta dikelilingi oleh tiga gunung, Merapi, Singgalang dan Sago seakan menjadi tonggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. Inilah yang menyebabkan Bukittinggi disebut juga sebagai “Kota Tri Arga”.

Disamping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan sejarah yang dapat diketgorikan sebagai keajaiban seperti, Lobang Jepang, benteng Fort De Kock, jam Gadang dll. Hal ini membuktikan Bukittinggi sebagai kota tua yang sarat dengan sejarah, salah satunya yang selalu melekat dengan sejarah bangsa yaitu : Bukittinggi menjadi Ibu Kota Republik pada masa PDRI Desember 1949 – Juli 1950.

Karunia alam yang ditopang dengan karunia sejarah ini, menyebabkan Bukittinggi menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dinikmati. Sinergi dengan potensi unggulan derah lainnya. Bukittinggi

juga dikembangkan menjadi wisata Perdagangan dan jasa , wisata kesehatan, wisata konfrensi dan peristirahatan serta jasa lain-lain. Ini dapat dibuktikan dengan kontribusi sector pariwisata untuk menompang PAD Bukittinggi yaitu : antara 30-40 %.

Untuk mendukung sektor pariwisata ini disamping objek alam yang ada dalam kota Bukittinggi, juga menyediakan paket-paket wisata daerah-derah sekitarnya. Dalam hal ini Bukittinggi akan berperan sebagai *"Home Base"* kunjungan wisata daerah-daerah lain. Saat ini Bukittinggi terdapat sebanyak 43 buah hotel baik berbintang maupun melati ditambah 11 mes/wisma/pondok wisata. Tidak salah kiranya Bukittinggi ditetapkan sebagai kota Wisata dan sekaligus Kota Tujuan Wisata Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Maret 1984 Bukittinggi dicanangkan sebagai Kota Wisata dan Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat. Dan pada bulan Oktober 1987 ditetapkan sebagai daerah Pengembangan Pariwisata Provinsi sumatera Barat dengan Perda Nomor : 25 tahun 1987.

d. Bidang Perdagangan dan Jasa

Bidang Perdagangan dan Jasa ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah adalah berangkat dan sejalan dengan fungsi Bukittinggi itu sendiri.

Dari sejarah Kota Bukittinggi, dimulai dengan didirikannya Pasar Atas diatas Bukit Kandang Kabau pada tahun 1858 yang dimaksudkan sebagai tempat transaksi bagi masyarakatnya. Lokasi inilah yang berkembang dan diperluas menjadi pusat kegiatan masyarakat Bukittinggi. Dengan demikian sejak semula Bukittinggi dimaksudkan dan mempunyai

fungsi sebagai tempat perdagangan. Seiring dengan pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan, sekaligus melekat pada fungsi penyediaan jasa.

Fungsi sebagai kota Perdagangan dan Jasa sudah melekat pada Kota Bukittinggi yasng berkembangnya dewasa ini demikian pesatnya, apalagi dengan didukung 4 pusat pasar induk :

1) Pasar Atas
2) Pasar Bawah
3) Pasar Simpang Aur
4) Pasar Banto

Menjadikan Bukittinggi sebagai sentral perdagangan, yang bukan hanya berskala regional, khususnya untuk barang-barang konveksi, pakaian jadi dan barang-barang kerajinan tangan. Produk ini merupakan kerajinan masyakat sekitar Bukittinggi dan pada umumnya dipasarkan di Pasar Aur dan potensi ini juga berskala nasional dan bahkan mancanegara.

Sektor Perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggiu, dimana hamper setengah pendapatan daerah pada tahun 2005 (43%) yang ditunjukkan dengan PDRB Kota Bukittinggi menjadi Pusat Pelayanan perdagangan dan jasa.

Disamping itu untuk mendukung dunia perdagangan dan jasa, kota ini juga berpotensi di bidang industri. Salah satunya adalah industri hasil pertanian dan kehutanan di Kota Bukittinggi berjumlah 810 jenis usaha industri, 5 jenis usaha industri yang cukup besar antara lain :

1) Industri Roti Kue Kering
2) Industri Kerupuk
3) Moudelling Komponen Bahan Bangunan
4) Industri perabot
5) Industri Kopi Bubuk

Sedangkan jumlah unit usaha 7 yang bergerak pada sector industri aneka jumlah 434 unit usaha. Perusahaan yang relative besar dan mengalami peningkatan pesat adalah industri pakaian jadi, konveksi, border dan industri sepatu / sandal.

Potensi inilah kedepan yang akan semakin dikembangkan dan akan berupaya menjadikan Bukittinggi sebagai "Etalase" perdagangan di Sumatera Barat. Kemungkinan tersebut telah dirintis melalui berbagai kerjasama dengan daerah tetangga dan bahkan dengan Negara tetangga.

5. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut data terakhir 98.505 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,04% dan kepadatan rata-rata 3.905 jiwa per-Km. Dengan semangat membangun masyarakat Bukittinggi yang cukup menggembirakan, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan hidup yang umumnya bermata pencarian sebagai pedagang, pegawai, petani, pengusaha indusrti kecil dan kerajinan serta jasa-jasa lainnya, dengan income perkapita tahun 2002 Rp. 8.200.265,87 dari data sementara, diperkirakan sampai akhir 2004 mencapai Rp. 8.500.000,00.

Sebagian besar penduduk kota Bukittinggi beragama Islam sekitar 97,89% dan selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu.

Penduduk terpadat berdomisili di kecamatan Guguk Panjang, karena pusat perdagangan dan kegiatan lain sebagian besar berada di kecamatan tersebut dengan kepadatan rata-rata 5.531 jiwa.

B. Hasil Uji Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif menggunakan data pendapatan asli daerah dan PDRB. Berikut adalah hasil dari uji deskriptif dengan menggunakan SPSS versi 23.

Tabel 4. 1

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	3560803000	130797000000	45459477529.43	40205593724.494
PDRB	30	1677088.99	6869402.25	3729137.0547	1661429.83778
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Hasil Olahan data SPSS versi 23

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selama kurun waktu 30 tahun terakhir dapat diketahui bahwa nilai minimum dari PAD adalah sebesar Rp. 3.560.803.000 yang dihasilkan pada tahun 1994 dan nilai maksimumnya adalah sebesar Rp. 130.797.000.000 yang dihasilkan pada tahun 2022. Rata-rata PAD yang di terima selama 30 tahun yaitu dari tahun 1994 hingga tahun 2023 adalah sebesar Rp. 45.459.477.529,43 dengan standar deviasi sebesar Rp. 40.205.593.724,494.

b. PDRB

Selama kurun waktu 30 tahun terakhir dapat diketahui bahwa jumlah PDRB terkecil adalah sebesar Rp. 1.677.088,99 yang diperoleh pada tahun 1994. Sedangkan jumlah PDRB terbesar yaitu sebesar Rp. 6.869.402,25 yang diperoleh pada tahun 2023. Dan rata-rata dari jumlah PDRB yang diperoleh selama 30 tahun yaitu dari tahun 1994 hingga 2023 adalah sebesar Rp. 3.729.137,0547 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.661.429,83778.

2. Uji asumsi klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi memiliki data yang berdistribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan pendekatan Kolmogrov Smirnov, dengan asumsi apabila:

1) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka tolah H_0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal
2) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka tidak tolak H_0 dan disimpulkan residual berdistribusi normal.

Berikut adalah hasil dari uji normalitas dengan menggunakan SPSS versi 23.

Tabel 4. 2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	305321.02532600
Most Extreme Differences	Absolute	.152
	Positive	.152
	Negative	-.098
Test Statistic		.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

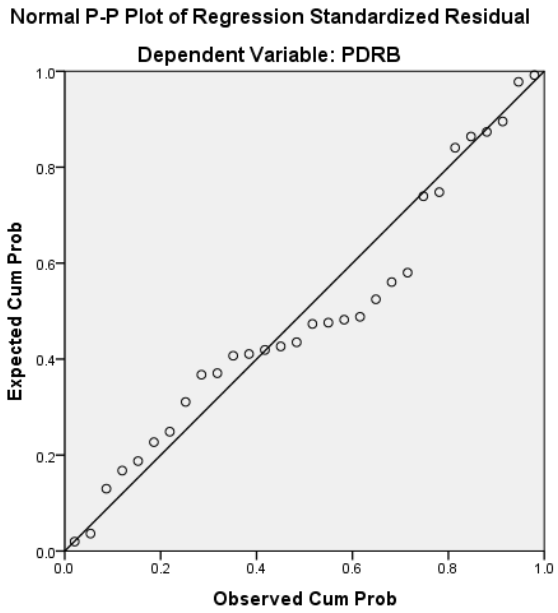
Sumber : Hasil Olahan data SPSS versi 23

Pada tabel 4.4 diatas, dari output Asymp. Sig (2-tailed) senilai 0,076 yang berarti nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 sehingga keputusan tidak tolak H_0 dan disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Selanjutnya Uji normal Probability Plot (normal p-plot) dengan gambar dibawah ini :

Gambar 4. 2

Hasil Uji Normal P-Plot



Sumber : Hasil Olahan data SPSS versi 23

Pada gambar 4.1 diatas, data pada variabel yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal. Karena suatu variabel akan dikatakan normal ketika gambar terdistibusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data juga searah mengikuti garis diagonal.

3. Uji-T (Parsial)

Uji T- statistic secara parsial (uji t) adalah uji yang digunakan untuk mngetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05.

Pengujian berdasarkan nilai signifikansi :

a. Jika sig > 0,05 maka H_0 diterima atau menolak Ha artinya bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Jika sig. < 0,05 maka H_0 ditolak atau atau menerima Ha, artinya bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian berdasarkan t hitung dan t tabel :

a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak Ha artunya bahwa variabel independent teidak berpengaruh terhadap variabel dependent.
b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima Ha artinya bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Mencari t tabel = t (a/2;n-k-1)

= t (0,05/2; 30-1-1)

= t (0,025 ; 28)

= 2, 0481

Berikut adalah hasil dari uji T – Statistik (Parsial dengan menggunakan SPSS versi 23.

Tabel 4. 3

Hasil uji T-statistik (parsial)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1882592.020	86455.957		21.775	.000
	PAD	4.062E-5	.000	.983	28.304	.000
a. Dependent Variable: PDRB						

Sumber : Hasil Olahan data SPSS versi 23

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui nilai t hitung yang diperoleh, Maka dapat diambil kesimpulan dalam uji T-statistik (parsial) ini:

a. Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD (X) berpengaruh terhadap variabel PDRB (Y).

b. Berdasarkan nilai t yang diperoleh diketahui bahwa nilai T_{hitung} sebesar 28,304 > 2, 04841, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD (X) berpengaruh terhadap variabel PDRB (Y).

4. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana adalah uji yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independent (X) dan satu variabel dependen (Y). Berikut uji regresi linear sederhana dilakukan menggunakan SPSS versi 23.

Tabel 4. 4

Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1882592.020	86455.957		21.775	.000
	PAD	4.062E-5	.000	.983	28.304	.000
a. Dependent Variable: PDRB						

Sumber : Hasil Olahan data SPSS versi 23

Dari tabel 4.7 diatas diketahui nilai constanta (a) sebesar 1882592.020, sedangkan nilai PAD (b / koefisien regresi) sebesar 4.062E-5 atau sebesar 0,00004062, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

Y = a + bX

Y = 1882592.020 + 0,00004062X

Persamaan tersebut dapat diartikan, sebagai berikut :

a. Konstanta sebesar 1882592.020 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasinya adalah sebesar 1882592.020.
b. Koefisien regresi X sebesar 0,00004062 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai PAD, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,00004062. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independent (X) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Y). Dengan kriteria jangkauan nilai R^2 antara 0 dan 1. Semakin dekat dengan 1 maka semakin baik kecocokannya. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4. 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983[a]	.966	.965	310725.35684
a. Predictors: (Constant), PAD				

Sumber : Hasil Olahan data SPSS versi 23

Berdasarkan tabel 4.8 diatas diperoleh angka R^2 (R *Square*) sebesar 0,966 atau sebesar 96,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap variabel variabel PDRB adalah sebesar 96,6%. Atau variasi variabel yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 96,6% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 3,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 23 yang dilakukan. Berdasarkan tabel 4.1 Uji Analsis Deskriptif menunjukkan bahwa selama kurun waktu 30 tahun terakhir dapat diketahui bahwa nilai minimum dari PAD adalah sebesar Rp. 3.560.803.000 yang dihasilkan pada tahun 1994 dan nilai maksimumnya adalah sebesar Rp. 130.797.000.000 yang dihasilkan pada tahun 2022. Rata-rata PAD yang di terima selama 30 tahun yaitu dari tahun 1994 hingga tahun 2023 adalah sebesar Rp. 45.459.477.529,43 dengan standar deviasi sebesar Rp. 40.205.593.724,494. Dan untuk PDRB selama kurun waktu 30 tahun terakhir dapat diketahui bahwa jumlah PDRB terkecil adalah sebesar Rp. 1.677.088,99 yang diperoleh pada tahun 1994. Sedangkan jumlah PDRB terbesar yaitu sebesar Rp. 6.869.402,25 yang diperoleh pada tahun 2023. Dan rata-rata dari jumlah PDRB yang diperoleh selama 30 tahun yaitu dari tahun 1994 hingga 2023 adalah sebesar Rp. 3.729.137,0547 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.661.429,83778.

Dapat dilihat pada tabel 4.2 Uji normalitas menunjukkan bahwa dari output Asymp. Sig (2-tailed) senilai 0,076 yang berarti nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 sehingga keputusan tidak tolak H_0 dan disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Dari nilai tabel 4.3 coefisient diperoleh nilai T_{hitung} sebesar 28,304 lebih besar dari T_{tabel} 2,04841 dan nilai sign 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Dengan demikian H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi "Terdapat pengaruh yang signifikansi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi" dapat diterima.

Berdasarkan hasil dari koefisien regresi diperoleh nilai positif atau memiliki pengaruh secara searah. Dari hasil tabel 4.4 perhitungan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan maka didapati hasil sebesar 4.062E-5 atau sebesar 0,00004062. Hal ini berarti menunjukkan bahwa setiap peningkatan dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 rupiah maka akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00004062. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan atau bertambah.

Berdasarkan tabel 4.5 uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R^2 *(R Square)* sebesar 0,966 atau sebesar 96,6%. Dari hasil perhitungan ini maka dapat diketahui bahwa kemampuan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah) dalam mempengaruhi variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) adalah sebesar 96,6%, sedangkan sisanya sebsar 3,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi yang dianalisis.

Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Bukittinggi hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendanai segala kebutuhan daerahnya terkait penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi.

Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik serta diikuti dengan peningkatan dari PAD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, semakin besar PAD yang diperoleh dan pemanfaatan PAD yang benar maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara penerimaan yang diperoleh dialokasikan ke dalam belanja daerah, sehingga apabila pengalokasian sudah tepat akan berdampak kepada masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suebah dan Iba Gunawan yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang" yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. Temuan serupa juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Eka Sri Mulyani dkk dalam jurnal "Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2001-2020", yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi PAD provinsi Kalimantan Timur maka semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Selain itu, penelitian oleh Novita Dwi Indriyani dan Eko Wanyudi berjudul "Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo,

Gresik)" juga mendukung hasil tersebut, dengan temuan bahwa PAD secara positif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya Raya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab 4 mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi" maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Dari hasil analisis data statistik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi yang dapat dilihat dari nilai T_{hitung} Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 28,304 lebih besar dari T_{tabel} yaitu sebesar 2,04841, dengan taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Yang berarti H_a diterima, sehingga menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi.
2. Berdasarkan uji koefisien determinasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittiggi adalah sebesar 96,6%, sedangkan sisanya adalah sebsar 3,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam variabel penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

   Bagi pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali potensi ekonomi lokal secara optimal, seperti sektor pariwisata, perdagangan dan UMKM yang perlu dibarengi dengan efisiensi dalam pengelolaan anggaran agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin maksimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, seperti hanya fokus pada satu variabel independen yaitu PAD, oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang terkait dengan sektor-sektor penyumbang PDRB untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi.

3. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai sumber referensi dalam memperkaya kajian-kajian penelitian terkait pertumbuhan ekonomi secara khusus dan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan datang.

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat mendukung kebijakan dalam peningkatan PAD dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah serta mematuhi kewajiban seperti membayar pajak dan retribusi, karean kontribusi masyarakat merupakan salah satu penopang dalam pembiayaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Expert

Afandi, Muhammad Nur, dkk. 2022. *Pembangunan Daerah Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Deepublish

Afandi, Yahya, 'Gereja Dan Pengaruh Teknologi Informasi "Digital Ecclesiology"', *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 1.2 (2019), 270–83

Afifah, Nunuy nur, dkk. 2020. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana

Alvonsus, Christofel Supit Watulingas, Paulus Kindangen, and Daisy SM Engka, 'Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.3 (2018), 104–17

Akib, Muhammad. 2021. *Hukum Lingkungan, Perspektif otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amir, Amri. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jambi: WIDA Publishing.

Ansofino,dkk. 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta:Deepublish

Apridar, Nasir, Abd.Jamal. 2019. *Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi; Analisis Pasca pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*,. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aulia, Rts. Ivo Tri, Siti Hodijah, and Etik Umiyati, 'Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2001-2017', *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 9.1 (2020), 26–34

Darma, Budi. 2021. *Statistika Penelitian Menggunakan Spps*. Jawa Barat: Geupedia.

Dini, Siti, Eva Agustina Br. Tarigan, and Melva Nava Abeliana Siregar, 'Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh', *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4.2 (2021), 65–80

Ekonomi, Fakultas, and Universitas Tidar, 'Pengaruh Ekspor , Impor , Dan Kurs Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Faqih Alamsyah Putra Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi ; Ekspor ; Impor ; Kurs The Effect of Exports , Imports , and Exchange Rates on Economic Growth in Indonesia The Topic Discu', 4.2 (2022), 121–34

Fitria, Eka Afridayani, 'Pengaruh Ekspor, Tabungan Bruto, Dan Pembentukan Modal Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1.2 (2022), 110–23

Ginting, Fransiskus, Efori Buulolo, and Edward Robinson Siagian, 'Implementasi Algoritma Regresi Linear Sederhana Dalam Memprediksi Besaran Pendapatan Daerah (Studi Kasus: Dinas Pendapatan Kab. Deli Serdang)', *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 3.1 (2019), 274–79

Gunawan, Iba, and Suebah Suebah, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Serang', *Journal Management Retail*, 02.1 (2022), 54–77

Hasibuan, Sri Wahyuni, dkk. 2022. *Ekonomi Makro Islam*. Yogyakarta: Nuta Media.

Hasyim ,Ali Ibrahim. 2017. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.

https://bukittinggikota.bps.go.id

Indriyani, Novita Dwi, and Eko Wahyudi, 'Pengaruh Pendapatan Daerah

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik)', *Yos Soedarso Economics Journal (YEJ)*, 3.2 (2021), 1–18

Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum dan hak Asasi Manusia era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Mahri, Jajang,dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam.* Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Mulyani, Eka Sri, Sudarman Sudarman, and Ratna Fitri Astuti, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020', *Educational Studies: Conference Series*, 1.2 (2021), 1–10

Nadjib, Abdul. 2023. *Keuangan Negara dan Daerah*. Jawa Barat: Penerbit Adab.

Nasution, Eza Okhy Awalia Br, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, and Khairina Tambunan, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Journal of Management and Creative Business*, 1.1 (2023), 63–71

Nurul Arbila, Yani Rizal, and Iskandar Iskandar, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu', *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2.4 (2022), 240–49

Pemerintah Kota Bukittinggi. *Catatan atas Laporan Keuangan (LKPD 2023)*. 2024.

Priadana, Sidik & Denok Sunardi. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Tangerang: Pascal Books

Sari, Kartika. 2019. *Ruang Lingkup Ekonomi Makro*. Klaten: Cempaka Putih.

Siyoto, Sandu & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media publishing.

Sulung, Geralda J.P, Een N. Walewangko, and Irawati Masloman, 'Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara', *Jurnal Berkala Efisiensi*, 22.5 (2022), 109–20

Susanti, Irma, and Fazrina Saumi, 'Penerapan Metode Analisis Regresi Linear Berganda Untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas Pada Kasus Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Aceh Tamiang', *Gamma-Pi: Jurnal Matematika Dan Terapan*, 4.2 (2022), 38–42

Tahun, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, and Universitas Brawijaya, 'Jdess 02.01.2023', 2.1 (2023), 194–204

Tuwo, Romi Daniel, Debby Christina Rotinsulu, and George M.V Kawung, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21.4 (2021), 79–90

Vivi Oktavia, and Dewi Zulvia, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2021', *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2.2 (2023), 266–82

Yuniarti, Puji, Wiwin Wianti, and Nandang Estri Nurgaheni, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.3 (2020), 169–76

Zulaikah & Anas Malik. 2023. *Ekonomi Makro Islam*. Malang: Litnus

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 424/Un.26.3/HK.00.5/11/2024
Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Dhea Biora Chantika** NIM. **3221061** tanggal 08 November 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Bara "**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Dr. Baginda Parsaulian, SE, ME**
NIP	:	19840312201801 1001
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Mikro
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 08 November 2024
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

ZULALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2: Data PAD dan PDRB tahun 1994-2023

PAD tahun 1994-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase (%)
1994	3.560.803.000	0%
1995	4.406.245.000	23,74%
1996	4.474.917.000	1,56%
1997	4.434.230.602	-0,91%
1998	3.624.268.000	-18,27%
1999	4.751.183.045	31,09%
2000	5.111.730.000	7,59%
2001	8.413.492.000	64,59%
2002	12.207.732.000	45,10%
2003	15.279.873.910	25,17%
2004	19.874.448.552	30,07%
2005	19.320.632.546	-2,79%
2006	24.397.364.000	26,28%
2007	26.896.480.000	10,24%
2008	33.828.543.000	25,77%
2009	44.924.168.000	32,80%
2010	33.847.174.752	-24,66%
2011	49.232.680.760	45,46%
2012	45.077.000.000	-8,44%
2013	55.204.000.000	22,47%
2014	61.604.000.000	11,59%
2015	66.027.359.716	7,18%
2016	71.303.000.000	7,99%
2017	102.375.000.000	43,58%
2018	101.937.000.000	-0,43%
2019	111.896.000.000	9,77%
2020	84.080.000.000	-24,86%
2021	91.786.000.000	9,17%
2022	130.797.000.000	42,50%
2023	123.112.000.000	-5,88%

Data PDRB tahun 1994-2023

Tahun	Seri 1993	Seri 2000	Seri 2010
1994	169.531,83	475941,37	1677088,99
1995	184.871,92	519006,93	1828840,41
1996	201.581,06	565915,95	1994135,12
1997	213.298,24	598810,60	2110047,00
1998	199.369,74	559707,92	1972259,69
1999	202.425,42	568286,39	2002487,93
2000	210.366,94	590.581,31	2081049,19
2001	219720,58	616.840,58	2173579,78
2002	230063,52	645.877,21	2275897,03
2003	242406,14	680.527,73	2397996,11
2004	256405,33	719.828,86	2536482,69
2005	271581,08	762.433,07	2686608,43
2006	288386,95	809.613,62	2852859,96
2007	307103,26	862.157,54	3038010,56
2008	327320,33	918.914,69	3.238.007,44
2009	344508,37	967.168,16	3.408.039,64
2010	363791,43	1.021.303,15	3.598.796,76
2011	386056,53	1.083.809,88	3.819.053,61
2012	411324,62	1.154.747,18	4.069.017,51
2013	437142,84	1.227.228,92	4.324.423,59
2014	464239,67	1.303.300,18	4.592.478,19
2015	492723,58	1.383.265,54	4.874.254,56
2016	522516,07	1.466.904,55	5.168.975,87
2017	554300,09	1.556.134,59	5.483.398,44
2018	587556,96	1.649.499,48	5.812.391,14
2019	621894,77	1.745.898,99	6.152.076,98
2020	611079,28	1.715.535,74	6.045.085,08
2021	630382,31	1.769.726,80	6.236.039,76
2022	662658,18	1.860.337,64	6.555.327,93
2023	694407,00	1.949.468,85	6.869.402,25

Lampiran 3: Hasil Olah Data

A. Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	3560803000	130797000000	45459477529.43	40205593724.494
PDRB	30	1677088.99	6869402.25	3729137.0547	1661429.83778
Valid N (listwise)	30				

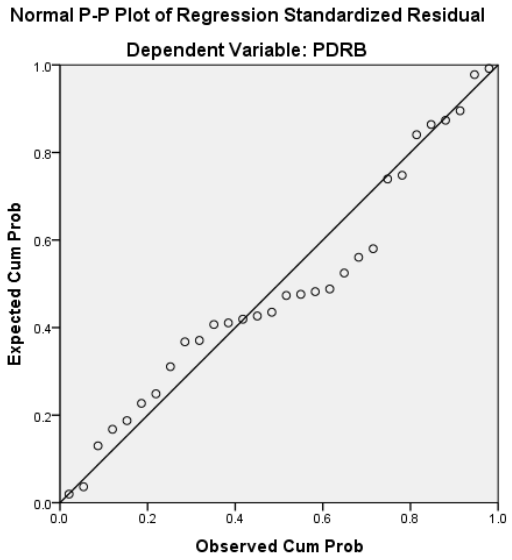
B. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

a. Uji *Kalmagrov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	305321.02532600
Most Extreme Differences	Absolute	.152
	Positive	.152
	Negative	-.098
Test Statistic		.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

b. Uji Normal P-Plot



C. Uji T (Uji Parsial)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1882592.020	86455.957		21.775	.000
	PAD	4.062E-5	.000	.983	28.304	.000
a. Dependent Variable: PDRB						

D. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1882592.020	86455.957		21.775	.000
	PAD	4.062E-5	.000	.983	28.304	.000
a. Dependent Variable: PDRB						

E. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983[a]	.966	.965	310725.35684
a. Predictors: (Constant), PAD				